

PERISTIWA BATIPUH TAHUN 1841 : SUATU STUDI KASUS
TENTANG GERAKAN SOSIAL DI SUMATERA BARAT¹

BATIPUH AFFAIR OF 1841 : A CASE STUDY
OF SOCIAL MOVEMENT IN WEST SUMATRA

Oleh

ZULQAIYYIM DAN ANATONA²

ABSTRAK

Studi ini mengkaji Peristiwa Batipuh tahun 1841 sebagai suatu gerakan sosial. Oleh karena itu, selain membahas latar belakang, proses, dan akibatnya, juga dikemukakan aspek-aspek sosial-budaya Minangkabau yang ikut mempengaruhi terjadinya Peristiwa Batipuh itu.

Rekonstruksi Peristiwa Batipuh tahun 1841 ini dilakukan dengan menggunakan azas-azas metode ilmu sejarah. Ada 4 (empat) langkah dalam metode sejarah, yaitu Heuristik, kritik ekstern dan intern, interpretasi, dan historiografi. Keempat langkah metode sejarah ini dikerjakan secara sistematis, sehingga kesahihan data dan kebenaran faktanya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

¹ Dibiayai oleh : Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan sesuai dengan Surat Perjanjian Peneliti Muda, Nomor: 010/P2IPT/DPPM/LITMUD/V/1996

² Staff Pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang.

Peristiwa Batipuh berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, yaitu mulai tanggal 22 Februari sampai 15 Maret 1841. Peristiwa Batipuh ini merupakan manifestasi dari ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Batipuh khususnya dan rakyat Minangkabau umumnya. Pemerintah kolonial Belanda membebankan kerja rodi dan "menganjurkan" untuk meningkatkan tanaman kopi rakyat dari tanaman pekarangan (koffiepagger) menjadi perkebunan. K.R.Dt. Pamuncak merasa dikecewakan karena sejak berakhirnya Perang Paderi (1837), Belanda mulai mengurangi kekuasaannya. Oleh karena itu K.R.Dt. Pamuncak memobilisasi para dubalangnya dan rakyat Batipuh dengan menghidupkan kembali Kerajaan Minangkabau.

Puncak dari protes yang dilakukan oleh rakyat Batipuh adalah menyerang benteng Belanda di Guguk Malintang. Benteng Guguk Malintang terletak di Padangpanjang, sekitar 8 Km sebelah Barat Batipuh. Dalam tempo 3 (tiga) hari mereka berhasil menguasai benteng dan kota Padangpanjang. Akan tetapi, keadaan ini tidak dapat bertahan lama, karena dalam waktu sekitar satu minggu Belanda berhasil menguasai keadaan kembali. Bahkan, K.R.Dt. Pamuncak dapat ditangkap Belanda pada tanggal 7 Maret 1841 dan kemudian diasingkan ke Cianjur. Adapun rakyat Batipuh diharuskan membayar semua kerugian dan membangun kembali semua prasarana yang telah rusak.

Peristiwa Batipuh tahun 1841 dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial yang arkhais. Hal ini disebabkan oleh peristiwa itu berlangsung dalam waktu yang relatif

pendek dan bersifat abortif. Adapun tendensnya adalah nativisme karena bercita-cita ingin menghidupkan kembali Kerajaan Minangkabau.

This study discusses the Batipuh Affair of 1841 as a social movement. In addition, this study is to examine the background, the process, and its effects to society. It is examining the aspect of Minangkabau social culture which influences Batipuh Affair.

The reconstruction of Batipuh Affair 1841 made by using historical method. It consists of four steps i.e: heuristic, extern and intern criticism, interpretation, and historiography. Those are made systematically, so the validity of the data and the truth of fact can be responsible academically.

Batipuh Affair is happened in a short time. It began since February 22, until March 25, 1841. This affair is the manifestation of injustice which felt by Batipuh people in particular and Minangkabau people in general. The colonial of the Dutch burden with "kerja rodi" and suggests to increase the coffee planting from the yard plant (*koffiepagger*) into plantation. Whereas Batipuh people has help the Dutch as long as Padri War (1821-1837), K.R.Dt. Pamuncak felt disappointed because the Dutch start to decrease his power since Paderi War (1837) ended. So, K.R.Dt. Pamuncak mobilizes his guards and Batipuh people revives Minangkabau Kingdom.

The climax of the protest which done by Batipuh

people to attack the Dutch fort in Guguk Malintang. Guguk Malintang fort is located in Padangpanjang about 8 km the Westward of Batipuh. In 3 days they succeeds to dominate in fort and Padangpanjang town. But this situation can't be hold out for along time, because in a week, the Dutch has succeeded to dominate the situation. Even K.R.Dt. Pamuncak can be caught by the Dutch on March 7, 1841 and then isolated to Cianjur, while Batipuh people should pay the detriment and rebuild infrastructure which have broken down.

Batipuh Affair of 1841 can be categorized as an archaic social movement. This caused by the affair which happened in short time. Whereas its tendency is nativism, because it has idea to revive Minangkabau Kingdom.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Masyarakat petani sering digambarkan sebagai masyarakat yang pasif, apatis, fatalistis, dan selalu menerima keadaan. Anggapan seperti itu terhadap masyarakat petani kiranya tidak sepenuhnya benar. Peristiwa Jengjawah di Jawa Timur yang terjadi pada bulan Mei tahun 1995,¹ misalnya, menunjukkan bahwa dalam menghadapi situasi dan kondisi kritis pada tingkat tertentu, masyarakat petani akan memberikan reaksinya. Bahkan, reaksi masyarakat petani itu dapat menjadi radikal, yaitu berupa kerusuhan atau pemberontakan.²

Keadaan seperti ini juga telah mewarnai sejarah Indonesia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20.³ Pada masa ini gerakan petani ditujukan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Hal ini disebabkan oleh kebijakan politik-

¹ Forum Keadilan, No. 4 Tahun IV, 8 Januari 1995, hlm. 34.

² Henry A. Landsberger, "Peasant Unrest: Themes and Variations", dalam Henry A. Landsberger (ed.), *Rural Protest: Peasant Movement and Social Change* (New York: Barnes and Noble Books, 1973), hlm. 29-33.

³ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Dari Emporium ke Imporium 1500-1900*, Jilid I (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 392. Sebuah buku yang membahas secara mendalam tentang gerakan petani di Indonesia, khususnya di Jawa pada masa kolonial Belanda adalah Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian unrest in the 19th and early 20th Centuries* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973).

ekonomi kolonial Belanda telah menimbulkan perubahan sosial dan menggoyahkan tatanan nilai tradisional masyarakat petani. Salah satu di antara reaksi petani yang menarik untuk dikaji adalah Peristiwa Batipuh pada tahun 1841.⁴

Peristiwa Batipuh ini berasal ketika rakyat Batipuh menyerang benteng Belanda di Guguk Malintang, Padangpanjang. Setelah berhasil menaklukan benteng Guguk Malintang, mereka juga dapat menduduki kota Padangpanjang. Serangan itu dipimpin oleh Regent Kali Rajo Batuak Pamuncak (K.R.Dt. Pamuncak). Tampilnya K.R.Dt. Pamuncak sebagai pemimpin gerakan menjadi bumerang bagi pemerintah Hindia Belanda, karena ia telah membantu Belanda selama Perang Paderi (1821-1837) dan merupakan orang kepercayaan pemerintah Hindia Belanda.

Mengapa rakyat Batipuh dan Regent K.R.Dt. Pamuncak berbalik menentang pemerintah Hindia Belanda? Bagaimana jalannya Peristiwa Batipuh itu? Bagaimana pula akibat yang ditimbulkannya setelah pemerintah Hindia Belanda berhasil memadamkan perlawanan rakyat Batipuh itu?

⁴ Ada empat karya tulis yang menyingsung tentang Peristiwa Batipuh tahun 1841. Keempat karya tulis itu adalah M. Radjab, *Perang Paderi di Sumatra Barat (1803-1838)* (Djakarta: Balai Pustaka, 1964); M.D. Mansoer, et al., *Sedjarah Minangkabau* (Djakarta: Bhratara, 1970); Christine Dobbin, *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Sumatra Tengah, 1784-1847* (London: Curzon Press, 1983); dan Rusli Amran, *Sumatra Barat Plakat Panjang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985).

Kerangka Analisis

Secara umum gerakan petani dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial, karena merupakan aktivitas kolektif yang bertujuan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang dicita-citakan atau sebaliknya menolak suatu perubahan.⁵ Gerakan Sosial dapat juga disebut sebagai Gerakan Petani karena persertanya terdiri dari petani. Pada umumnya Gerakan Petani disebabkan oleh perubahan sosial yang mereka alami.

"Tidak dapat disangkal, bahwa dominasi politik kolonial Barat yang menimbulkan perubahan sosial telah menciptakan kondisi yang memungkinkan lahirnya pergolakan sosial. Penetrasi ekonomi, politik, dan kultural Barat yang terjadi pada masa kolonial telah mengakibatkan runruhnya tata kehidupan tradisional beserta lembaga-lembaga mereka"⁶

Perubahan sosial ini pada gilirannya menimbulkan desintegrasi sosial dan frustrasi dalam kalangan masyarakat petani, yang kemudian dimanifestasikannya dalam bentuk Gerakan Petani.

Munculnya Gerakan Petani ini, dimungkinkan karena adanya ideologi yang menampung dan menyalurkan aspirasi petani, seperti nativisme, millenarisme, dan revivalisme.

⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 205; lihat juga Paul B. Hartom dan Chester L. Hunt, *Sosiologi, Jilid II*, Terjemahan Aminuddin Ram (Jakarta: Erlangga, 1989), him. 195-199.

⁶ Djoko Suryo, "Gerakan Petani", *Prisma* No. 11 Tahun XIV/1985, hlm. 17.

Ideologi ini dapat menggugah kesadaran bersama dan membentuk solidaritas rakyat pedesaan dan keaudian memenifestasikan reaksi mereka dalam bentuk Gerakan Protes.⁷ Kelahiran ideologi itu biasanya seiring dengan munculnya pemimpin gerakan, karena ialah yang memobilisasi rakyat melalui ideologi itu. Adapun bentuk ideologi dan kepemimpinan suatu gerakan petani diwarnai oleh kondisi sosio-kultural masyarakat desa itu.⁸

Gerakan sosial seperti itu lazim bersifat arkhais.⁹ Baik organisasi dan programnya, maupun strategi dan taktiknya masih terlalu sederhana atau embrioner. Oleh karena itu dengan mudah dapat ditindas oleh kekuatan militer kolonial, sehingga umurnya sangat pendek atau abortif. Selain itu gerakan sosial yang arkhais juga bersifat lokal atau regional, dan tidak ada koordinasi antara satu dengan lainnya.¹⁰ Hal ini disebabkan karena daerah pedesaan bersifat segmentasi dan solidaritas komunal desa didasari oleh ikatan primordial.¹¹ Persitiwa-peristiwa seperti ini oleh pemerintah kolonial

⁷ *Ibid*, hlm. 20.

⁸ *Ibid*, hlm. 18.

⁹ Selain bersifat arkhais, gerakan sosial juga bersifat transisional dan modern. Lihat Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 209; lihat juga Djoko Suryo, *op. cit.*, hlm. 21-24.

¹⁰ Sartono Kartodirdjo, *loc. cit.*

¹¹ Djoko Suryo, *loc. cit.*

Belanda digolongkan sebagai gangguan ketentraman (*rustverstoring*), huru-hara (*woelingen*), kerusuhan (*onlusten*), atau gerakan rohani (*geestdrijverij*).¹²

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode ilmu sejarah, yang terdiri dari 4 (empat) langkah kerja, yaitu heuristik, kritik ekstern dan intern, interpretasi, dan historiografi.¹³ Heuristik adalah usaha untuk menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Untuk itu dilakukan studi kearsipan dan kepustakaan di Padang, Padangpanjang, dan Jakarta.

Tahap kedua melakukan kritik terhadap sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh itu. Kritik sumber ini dilakukan secara ekstern dan intern, untuk mendapatkan data dan fakta yang sahih. Selanjutnya, data dan fakta itu diinterpretasikan untuk menetapkan saling hubungan antara fakta itu. Terakhir, tahap penulisan (historiografi), yaitu proses merangkaikan fakta sejarah itu menjadi suatu kisah sejarah. Oleh karena itu, pada tahap terakhir ini juga dilakukan seleksi sejarah. Maksudnya, fakta sejarah itu harus dipilih sesuai dengan derajat relevansinya dengan topik yang dikaji.

¹² Sartono Kartodirdjo, *Ioc. cit.*

¹³ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 18-20.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daerah Batipuh

Topografis daerah Batipuh berbukit dengan lembahnya sempit. Kondisi alam Batipuh ini disebabkan oleh karena Nagari Batipuh terletak di kaki bagian Selatan Gunung Merapi. Kemudian makin ke Selatan makin rendah dan sampai di pinggir sebelah Barat Laut Danau Singkarak. Oleh karena itu, tinggi daerah Batipuh cukup bervariasi, yaitu dari 500 M sampai 1500 M di atas permukaan laut.¹⁴

Kondisi alam daserah Batipuh itu membuat penduduknya lebih mengusahakan tanaman ladang dari pada sawah. Sawah-sawah di daerah Batipuh dibuat dari lembah hingga kaki-kaki bukit, sehingga sawah-sawah itu bertingkat-tingkat. Sementara sungai-sungai kecil yang mengalir dari pinggiran Gunung Merapi dapat pula menjadi sarana pengairan bagi areal persawahan itu.¹⁵ Sekali-sekali muntahan lava Gunung Merapi membuat tanah pertanian ini subur.

Secara tradisional daerah Batipuh termasuk dalam *Luhak Tanah Datar*.¹⁶ Di Batipuh berkedudukan Tuan Gadang,

¹⁴ Wali Negeri Batipuh Atas, "Sedjarah Batipuh Atas, Susunan Adat", Monographie (Ketjamatatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar: t.p., 1952), hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁶ Secara tradisional wilayah Minangkabau disebut dengan Alam Minangkabau, yang dibagi atas *Darek* dan *Pesisir*. Daerah *Darek* terdiri dari tiga *Luhak*, yaitu

Panglima Perang Kerajaan Minangkabau.¹⁷ Hal ini disebabkan oleh letak Batipuh yang strategis, yaitu di jalur perdagangan emas antara Luhak Tanah Datar dan Pesisir Sumatera Barat. Selain itu, daerah Batipuh juga merupakan daerah Darek yang terdepan, yang berhadapan dengan daerah Pesisir. Oleh karena itu, Tuan Gadang juga bertugas sebagai penjaga jalur perdagangan antara Darek dan Pesisir.

Oleh karena hubungan politik-pemerintahan itu, K.R.Bt. Pamuncak yang menjabat sebagai Tuan Gadang di Batipuh merupakan salah seorang yang anti-Paderi. Selama berlangsungnya Gerakan Paderi (1803-1821), Batipuh merupakan daerah yang sulit dikuasai oleh kaum Paderi.¹⁸

Luhak Tanah Datar, Agam, dan L. Koto. Oleh karena itu Darek dikenal juga dengan sebutan Luhaknan Tigo (Luhak yang Tiga). Dari ketiga Luhak inilah orang Minangkabau berkembang ke daerah Rantau, yang terletak di pantai Barat dan Timur bagian Tengah Pulau Sumatera. P.E. Josselin de Jong, *Minangkabau and Negeri Sembilan: Social Structure in Indonesia* (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1952), hlm. 54-66. Lihat juga A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Press, 1984), hlm. 45-56. Sekarang ketiga Luhak itu masing-masingnya dapat diidentikkan dengan daerah Kabupaten Tanah Datar, Agam, dan L. Koto.

17 Sistem Pemerintahan Kerajaan Minangkabau terdiri dari Raja Tigo Gelo dan Basa Ampek Balai. Raja Tigo Gelo merupakan tiga orang raja yang membawahi bidangnya masing-masing, yaitu Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat. Basa Ampek Balai merupakan menteri-menteri Kerajaan Minangkabau, yang terdiri dari 4 (empat) orang. Keempat menteri itu adalah Andomo di Saruaso, Makhudum di Sumanik, Bandaro di Sungai Tarab, dan Tuan Gadang di Batipuh. A.A. Navis, op. cit. hlm. 17 dan 57-58.

18 Rusli Amran (1985), op. cit., hlm. 125-126.

Bahkan, K.R.Dt. Pamuncak berhasil memukul mundur pasukan Paderi ketika menyerbu daerah Batipuh. K.R.Dt. Pamuncak juga menjadikan daerah Batipuh sebagai daerah penampung pelarian orang-orang yang anti-Paderi.

Pemerintahan Hindia Belanda di Padang Barat

Ketika memasuki daerah Darek pada tahun 1821,¹⁹ Belanda tidak menemukan lembaga pemerintahan yang dapat dijadikan penghubung dengan rakyat Minangkabau dan sekaligus sebagai penyangga kekuasaannya di Sumatera Barat.²⁰ Kondisi ini disebabkan oleh karena masyarakat Minangkabau tidak mengenal lembaga sosial-politik yang

¹⁹ Belanda memasuki daerah Darek setelah ditandatanganinya perjanjian dengan keturunan Raja Minangkabau, Sultan Alam Bagagarsyah dan wakil-wakil penghulu dari Luhak Tanah Datar, pada tanggal 10 Februari 1821. Perjanjian itu berisi kesediaan Belanda untuk membantu menghadapi Kaum Paderi di daerah Darek. Sebagai imbalannya kepada Belanda diserahkan daerah Pagaruyung, Saruaso, dan Sungaitarab kepada Belanda. Pada sisi lain sesungguhnya Belanda mempunyai keinginan untuk menguasai sumber komoditi perdagangan dari Minangkabau, seperti kopi, gambir, dan kayu manis. Rusli Amran, *Sumatra Barat hingga Plakat Panjang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), him. 407-409.

²⁰ Pada tahap awal (1821-1823) berkuasanya Belanda, daerah Sumatera Barat dibaginya atas dua *hoofdafdeeling*, yaitu *Hoofdafdeeling Minangkabau* dan *Padang*. *Hoofdafdeeling* Minangkabau meliputi daerah Darek, sedangkan *Hoofdafdeeling* Padang meliputi daerah Pesisir. Sebagai kepala pemerintahan *hoofdafdeeling* diangkat keluarga Kerajaan Minangkabau, yaitu Sultan Alam Bagagarsyah sebagai *Hoofdregent* Minangkabau dan kemudian Sultan Mansyursyah sebagai *Hoofdregent* Padang. "Extract uit het Register der Handelingen en Resolutien van den Gouverneur Generaal in Rade 4 November 1823" Arsip Nasional, SWK, No. 143.

lebih tinggi dari pada nagari. Keberadaan Raja dan Kerajaan Minangkabau hanya diakui oleh masyarakat Minangkabau sebagai penjaga keseimbangan hubungan antar nagari. Oleh sebab itu Belanda menciptakan *kelarasan* dan *regentschap*, sebagai lembaga pemerintahan supra-nagari. Kelarasan diciptakan Belanda bagi daerah-daerah yang baru ditaklukannya, sedangkan *regentschap* bagi daerah-daerah yang pro-Belanda selama Perang Paderi (1821-1837). Dengan demikian nagari yang semula bersifat otonom, ditarik ke dalam orbit pemerintahan kolonial Belanda.

Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini menggambarkan tentang perkembangan pembentukan wilayah administrasi pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat, khususnya di Padang Barat.

Tabel 1

Jumlah *Regentschappen* dan nama-nama *Regent*
di Padang Barat
Tahun 1824-1841

| No. | Regentschappen | Nama Regent | Tahun |
|-----|----------------|--------------------------|-----------|
| 1. | Tanah Datar | Sultan Alam Bagagarsyah* | 1824-1833 |
| 2. | Agam | Tuanku Samit | 1824- ? |
| 3. | L Koto | Tuanku Cedok | 1832- ? |
| 4. | Batipuh | Kali Rajo Dt. Pamuncak | 1833-1841 |
| 5. | Halaban | Tuanku Halaban | 1837- ? |

* Sultan Alam Bagagarsyah sebelumnya menjabat sebagai *Hoofdregent* Minangkabau. Akan tetapi, sejak dihapuskannya wilayah *Hoofdafdeeling* Minangkabau pada tahun 1824, Sultan Alam Bagagarsyah diangkat sebagai *Regent* Tanah Datar.

Sumber: Christine Dobbin, *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784-1847* (London: Curzon Press, 1984), hlm. 103-108; Elizabeth Graves, *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century* (Ithaca, New York: Cornell University

Press, 1981), hlm. 148-153, dan Rusli Amran, *Sumatra Barat Plakat Panjang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 140-149.

Tabel 1 menunjukan bahwa pembentukan *regentschap* dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sifatnya sementara. *Regentschap* ini dihapuskan oleh Belanda setelah kedudukannya kuat. Sebagai gantinya dibentuk wilayah *kelarasan*. Oleh karena itu, wilayah *kelarasan* berkembang terus jumlahnya, terutama setelah Perang Paderi berakhir (1837) dan Belanda menguasai Sumatra Barat, seperti yang tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2
Perkembangan Jumlah *Kelarasan*
di Daerah Padang Darat
Tahun 1823-1832

| No. | Luhak | 1823 | 1825 | 1832 | 1842 |
|-----|-------------|------|------|------|------|
| 1. | Tanah Datar | 27 | 29 | 29 | 33 |
| 2. | Agam | 7 | 9 | 21 | 24 |
| 3. | L. Kota | - | - | 14 | 20 |
| | Jumlah | 36 | 38 | 64 | 77 |

Sumber: "Instructie voor den Adsistend Residen van de Afdeeling der Padangsche Bovenlanden", Arsip Nasional, SWK, No. 143; Christine Dobbin, *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784-1847* (London: Curzon Press, 1984), hlm. 185-188.

Regent K.R.Dt. Pamuncak

Kali Rajo Datuak Pamuncak (K.R.Dt. Pamuncak) telah menjabat sebagai Tuan Gadang di Batipuh, ketika Gerakan

Paderi mulai dicertuskan pada tahun 1803.²¹ Hubungannya yang dekat dengan pusat Kerajaan Minangkabau di Pagaruyung, telah menjadikannya sebagai seorang yang anti Paderi.²² Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau K.R.Dt. Pamuncak memilih untuk bekerjasama dengan Belanda dalam Perang Paderi (1821-1837).

Berkat kerja sama yang dibinanya itu, pemerintah Hindia Belanda mengangkatnya sebagai *Regent Batipuh* pada tahun 1833 dengan hak-hak istimewa.²³ Demikian pula halnya dengan para *hukubalang*-nya dan rakyat Batipuh, mereka dibebaskan dari kerja rodi dan menanam kopi. Keistimewaan ini diterima oleh mereka setelah berhasil membantu Belanda dalam memadamkan perlawanan rakyat Minangkabau pada tahun 1833.

Akan tetapi, setelah Belanda berhasil mengakhiri Perang Paderi dan menguasai Minangkabau, maka hak-hak istimewa yang diterima oleh *Regent* K.R.Dt. Pamuncak dikurangi oleh Belanda. *Regent* K.R.Dt. Pamuncak harus menerima pejabat *contrôleur* yang ditugaskan Belanda. Selain itu, kedudukannya juga diturunkan menjadi setingkat di bawah Asisten Residen Tanah Datar. Sedangkan *hukubalang*-nya dan rakyat Batipuh dikenakan kerja rodi

²¹ A.A. Navis, *op. cit.*, hlm. 58.

²² Christine Dobbin, *op. cit.*, hlm. 284.

²³ H.M. Lange, *Het Nederlandsche Oost-Indisch Leger ter Westkust van Sumatra (1817-1845)*. (Hertogenbosch: Gebr. Mullers, 1854), hlm. 358.

dan diharuskan menanam kopi.²⁴

Akibatnya, baik Regent K.R.Dt. Pamuncak maupun bulubalang-nya dan rakyat Batipuh merasa dikecewakan oleh Belanda. Oleh karena itu, Regent K.R.Dt. Pamuncak memobilisasi bulubalang-nya dan rakyat Batipuh untuk menentang Belanda. Penggalangan solidaritas dilakukannya dengan mencita-citakan kembali berdirinya Kerajaan Minangkabau, yang menempatkan daerah Batipuh sebagai salah satu daerah yang penting.

Terjadinya Peristiwa Batipuh Tahun 1841

Sebagai aksi pertama, pada tanggal 22 Februari 1841, kemenakan K.R.Dt. Pamuncak, Jua Imbang St. Pamuncak dan para dubalang-nya membunuh seorang pedagang Cina beserta istrinya dan seorang pengawalnya. Pada hari itu ketiganya sedang melewati Batipuh, saat melakukan perjalanan dari Batusangkar (Fort van der Capellen) ke Padangpanjang.²⁵

Besoknya, pada tanggal 23 Februari 1841 K.R.Dt. Pamuncak mengangkat dirinya sebagai pemimpin perlawanan. Kemudian disusunnya strategi dan taktik untuk menyerbu benteng Guguk Malintang dan Padangpanjang, yang terletak sekitar 8 Km sebelah Barat Batipuh. Pada tanggal 24 Februari 1841 K.R.Dt. Pamuncak, para dubalang-nya, dan

²⁴ G. Lauts, *Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding Bloei en Verval van de Magt der Nederlanders in Indie* (Amsterdam: Freiderik Muller, 1852), him. 114-115.

²⁵ H.M. Lange, op. cit., him. 380-381.

rakyat Batipuh melakukann serangan secara berturut-turut selama 3 (tiga) hari.²⁶

Usaha K.R.Dt. Pamuncak ini berhasil, sehingga dapat menguasai benteng Buguk Malintang dan kota Padangpanjang. Akan tetapi, kesuksesan yang diraih rakyat Batipuh ini tidak berlangsung lama. Pada tanggal 2 Maret 1841, Gubernur Sipil dan Militer Sumatera Barat, Kolonel A.V. Michaels menyerang Padanganjang dari tiga jurusan: dari Padang, Bukittinggi (Fort de Kock), dan Barusangkar (Fort van der Capellen).²⁷ K.R.Dt. Pamuncak dan pengikutnya mundur ke arah Gunung Merapi.

Sehari setelah penggepungan itu K.R.Dt. Pamuncak berhasil ditangkap Belanda. Ia kemudian diasingkan ke Batavia, kemudian dipindahkan ke Cianjur sampai meninggalnya tahun 1842. Sebagai yang melanjutkan pimpinan perlawanan dipergantikan oleh kemenakannya, Jua Imbang St. Pamuncak. Akan tetapi ia pun tidak dapat bertahan lama. Pada tanggal 15 Maret 1841 Jua Imbang pun pun tertangkap dan diasingkan ke Ambon.²⁸ Bagi rakyat Batipuh diwajibkan membayar kerugian sebesar 1.100.000,- dan membangun kembali prasarana yang telah rusak.²⁹

²⁶ J.P. Schoemaker, *Nederlanders Indische Krijgs-verhalen's* (s'Gravenhage: t.p., 1894), hlm. 2-5.

²⁷ H.M. Lange, *op. cit.*, hlm. 383.

²⁸ H.M. Lange, *op. cit.*, hlm. 385.

²⁹ Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sipil dan

Akibat Peristiwa Batipuh Tahun 1841

Berhasilnya pemerintah Hindia Belanda mengatasi perlawanan rakyat Batipuh yang dipimpin oleh *Regent* K.R.Dt. Pamuncak, telah membuatnya semakin berkuasa di Sumatera Barat. Meskipun secara resmi Sistem Tanam Paksa Kopi diberlakukan pada tahun 1847, namun sebelum itu prinsip-prinsip Tanam Paksa itu telah diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Rakyat Batipuh yang selama dibebaskan dari kerja rodi dan menanam kopi, sejak itu diwajibkan lagi.

Kerogeninan Batipuh dihapuskan dan dibagi atas 2 (dua) Kalarasan, yaitu Kalarasan Batipuh Atas dan Batipuh Bawah. Tujuan pembagian ini adalah agar kekuatan daerah Batipuh menjadi terpecah dan lemah. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga lebih mudah mengontrol daerah itu.

KESIMPULAN

Peristiwa Batipuh merupakan suatu perlawanan dari rakyat Batipuh terhadap pemerintah Hindia Belanda. Peristiwa ini berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dari tanggal 22 Februari sampai 15 Maret 1841. Timbulnya perlawanan dari rakyat Batipuh, yang

Militer Sumatera Barat, A.V. Michaels, No. 381 tanggal 17 Maret 1841; lihat juga H.M. Lange, op. cit., hlm. 403-304.

semula membantu Belanda, disebabkan oleh pemaksaan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Perlawanan ini dipimpin oleh *Regent* Batipuh, K.R.Dt. Pamuncak yang juga merasa kecewa atas perlakuan Belanda.

Jika dicermati Peristiwa Batipuh dapat dikategorikan kepada gerakan sosial arkhais. Hal ini ditunjukan oleh umur gerakan yang relatif pendek, tidak adanya perumusan sasaran setelah tujuan tercapai, dan kurangnya pengorganisasian kekuatan, sehingga mudah dilumpuhkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Adapun ideologi yang digunakan oleh K.R.Dt. Pamuncak untuk menumbuhkan solidaritas rakyat Batipuh adalah nativisme. Baik rakyat Batipuh maupun *Regent* K.R.Dt. Pamuncak menginginkan berdirinya kembali Kerajaan Minangkabau, karena daerah Batipuh menempati posisi yang penting dalam Kerajaan Minangkabau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arsip

- "Extract uit het Register der Handelingen en Re-
solutien van den Gouverneur Generaal in Rade 4
November 1823" *Arsip Nasional, SWK*, No. 143.
- "Instructie voor den Adistent Residen van de Afdeling
der Padangsche Bovenlanden", *Arsip Nasional, SWK*,
No. 143.

Buku-buku dan Majalah

- A.A. Navis. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press, 1984.
- de Jong, P.E. Josselin. *Minangkabau and Negeri Sembilan: Social Structure in Indonesia*. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1952.
- Djoko Suryo, "Gerakan Petani", *Prisma* No. 11 Tahun XIV/1985.
- Dobbin, Christine. *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784-1847*. London: Curzon Press, 1983.
- Forum Keadilan, No. 4 Tahun IV, 8 Januari 1995,
- Graves, Elizabeth E. *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1981.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Harton, Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi, Jilid II*, Terjemahan Aminuddin Ram. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Landsberger, Henry A. "Peasant Unrest: Themes and Variations", dalam Henry A. Landsberger (ed.), *Rural Protest: Peasant Movement and Social Change*. New York: Barnes and Nobles Books, 1973.
- Lange, H.M. *Het Nederlandsche Oost-Indisch Leger ter Westkust van Sumatra (1819-1845)*. Hertogenbosch: Gebr. Mullers, 1852.

- Lauts, G. *Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding Bloei en Verval van de Magt der Nederlanders in Indie*. Amsterdam: Freiderik Muller, 1852.
- M.D. Mansoor, et al. *Sedjarah Minangkabau* (Djakarta: Bhratara, 1970);
- M. Radjab. *Perang Paderi di Sumatra Barat (1803-1838)*. Djakarta: Balai Pustaka, 1964.
- Rusli Amran. *Sumatra Barat hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- _____. *Sumatra Barat Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
- Sartono Kartodirdjo. *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian unrest in the 19th and early 20th Centuries*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973.
- _____. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- _____. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Dari Emporium ke Imperium 1500-1900, Jilid 1*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Schoemaker, J.P. *Nederlanders Indische Krijgsverhalen's* ('s Gravenhage: t.p., 1894).
- Wali Negeri Batipuh Atas. "Sedjarah Batipuh Atas, Susunan Adat", *Monographie*. Ketjamsatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar: t.p., 1982.